

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Windi Handayani Otoluwa

windihadayani47@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the Implementation of animal control policy at Parigi Moutong regency. Furthermore, this study using the Theory of Van Meter and Van Horn with basic descriptive type and qualitative research. In this study, the selection of informants was taken purposively. Where researchers deliberately would choose those that are considered to understand the issues examined. Data was collected through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study showed that the Implementation of animal control policy at Parigi Moutong regency has not gone well given the weakness of the sanction given to farmers who let their animals roam the bodies roads, and lack of traction on the implementor in this case the relevant institutions in implementing regulations No. 25 of 2005 on the Control of livestock and there are still farmers/herders are indifferent or less aware of the impact arising from their livestock if released or roam in any place.

Keywords: *Standards and Policy Objectives, Resources, Communications, characteristic of the Executing Agency, social Environmental Economics, Politics and Attitude Executor*

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Analisis implementasi kebijakan tentang penertiban ternak pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong dalam perjalanannya belum berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran bebas di jalan, pasar tradisional maupun masuk dalam areal pekarangan rumah penduduk dan perkantoran.

Regulasi penerapan peraturan daerah tentang penertiban ternak masih lemah dalam pengimplementasiannya yang diakibatkan belum terdapatnya komitmen pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menjalankan peraturan ini dan masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki peternak. Dalam

perjalanan mestinya Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil langkah tegas untuk menerbitkan ternak yang berkeliaran bebas. Jika ini dilakukan maka peternak akan semakin sadar untuk tidak membiarkan ternak mereka berkeliaran.

Dengan demikian pemerintah daerah selayaknya melalui Satpol PP seharusnya segera melakukan penertiban ternak yang berkeliaran. Sehingga dapat menimbulkan efek jera minimal bagi warga yang melanggar perda diberikan sanksi yang tegas. Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran bebas maka daerah Kabupaten Parigi Moutong akan tampak terkesan tidak bersih akibat kotoran ternak yang berada di sembarang tempat.

Argumentasi diatas perihal tentang penertiban ternak merupakan bagian dari persoalan yang mungkin kecil dari sebuah proses implementasi kebijakan. Namun, hal terkecil ini tidak boleh di abaikan karena akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk membiarkan ternak mereka berkeliaran

disembarang tempat. ternak yang berkeliaran bebas ini juga bisa merusak tanaman produksi petani. Bukan hanya menimbulkan kesan jorok akibat kotoran ternak tetapi juga merusak tanaman milik masyarakat di daerah ini. Jika ternak merusak tanaman masyarakat maka bisa jadi dampaknya menimbulkan pertentangan antara petani dan peternak.

Untuk menciptakan Kabupaten Parigi Moutong yang bersih dan tentram perlu usaha yang ekstra. Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, perlu ada upaya penertiban agar implementasi Perda dapat berjalan baik. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa upaya penertiban bukanlah langkah yang baik yang diambil oleh pemerintah Kabupaten itu sendiri. Tapi disisi lain pemerintah harus tegas mengimplementasikan suatu Perda sebab pemerintah dinilai banyak tenggang rasa sehingga masyarakat tidak menaati suatu perda langkah tegas pun diambil pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam hal penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya untuk mengawasi ketertiban dan gangguan lalu lintas dan bagi kawasan-kawasan hijau, maka pengelolaan usaha ternak dan pemeliharaan ternak perlu diawasi melalui kebijakan pemerintahan yakni peraturan daerah (PERDA) tentang penertiban hewan ternak sebagai landasan hukumnya.

Adapun masalah ternak yang berkeliaran sering kita jumpai di sepanjang jalan Kabupaten Parigi Moutong dimana kawanan hewan ternak sering menempati jalan raya dan bahkan sampai tiduran di badan jalan dan itu sangat mengganggu aktifitas pengendara yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat dihindari, tak sedikit akibat dari berkeliaraannya hewan ternak di pinggir jalan yang memakan korban khususnya para pengendara roda dua. Akibatnya mereka harus menelan kerugian baik secara fisik maupun secara material.

Secara teknis di lapangan penerapan yang berdasarkan peraturan daerah sebelumnya masih belum maksimal

dikarenakan masih sering ditemukannya hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu aktivitas warga di Kabupaten Parigi Moutong. Maka diharapkan kepada pemerintah agar dapat menjalankan peraturan daerah tersebut.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sugiyono, (2006:1).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis, Arikunto (2001:21).

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive. Menurut Siregar (2010:148) Purposive adalah metode penetapan responden atau informn berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja selaku Implementor
- 3) Para aparat Desa/lurah
- 4) Masyarakat Peternak/pengembala ternak.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendapat Miles dalam (Faisal 2003:59) sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokan data secara sistimatis agar lebih mudah untuk dipahami.

2) Reduksi Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3) Penyajian Data

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

4) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada

tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

5) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaannya sehingga kesahihan data terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan perinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposis yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong untuk itu penulis memakai enam Indikator yang dikemukakan Van Meter Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 1999). Yaitu Standard dan sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkuan sosial ekonomi politik, dan sikap pelaksana.

Standard Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran dari Peraturan Daerah No 25 tahun 2005 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah jelas dan hasilnya sangat bergantung pada kesigapan dan kerja sama yang baik dari instansi-instansi terkait dan juga kesadaran masyarakat peternak/pengembala tentunya. Kebijakan penertiban ternak ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran,

kenyamanan dan kebersihan kota di Kabupaten Parigi Moutong.

Standar kebijakan ini ialah menertibkan ternak berkeliaran di tempat umum dan sasaran yang telah diamanati belum sepenuhnya tercapai dan juga sanksi-sanksinya harus lebih dipertegas lagi guna member efek jera bagi pemilik atau pengembala ternak khususnya pada Kabupaten Parigi Moutong. Hal tersebut membuat atau menjadikan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong menjadi belum maksimal atau belum terlaksana sepenuhnya karna mengingat masih adanya program-program terkait Penertiban tersebut belum dijalankan.

Sumber Daya

Mengenai dukungan sumber daya dalam pengimplementasian Peraturan daerah No 25 tahun 2005 peneliti, yakni sumber daya ini meliputi pengetahuan masyarakat, dan keahlian dari para pelaksananya serta tersedianya fasilitas dan prasarana guna menunjang dalam pengimplementasian Peraturan Daerah ini.

Sumber daya manusia yang kurang memadai (kesadaran masyarakat) dapat berakibat atau sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya Peraturan Daerah ini, dikarenakan apabila jika masih adanya pembiaran dari masyarakat (peternak/pengembala) melepas ternaknya atau mengembalaknya ditempat umum sehingga masih mengganggu aktivitas warga dan bahkan berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan berlalu lintas, ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat peternak/pengembala itu sendiri.

Mengenai dukungan Sumber Daya Finansial sampai dengan saat ini sudah cukup baik dan sarana prasarana sudah cukup memadai untuk mendukung Peraturan Daerah No 25 tahun 2005 di Kabupaten Parigi Moutong dengan tersedianya beberapa alat dan perlengkapan yang diperlukan. Hanya saja

sebagian masyarakat peternak/pengembala kurang peka mengenai masalah ini dan menunggu realisasi bantuan yang di janjikan pemerintah. Karena masalah hewan ternak yang berkeliaran ini menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, juga masyarakat itu sendiri. Hal tersebut pada akhirnya menghambat terwujudnya maksud dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak.

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak telah dimulai dari pembentukan program-program dalam rangka menertibkan hewan ternak berkeliaran diseluruh wilayah yang salah satunya Kabupaten Parigi Moutong. Setelah mengambil Kebijakan dan membuat Peraturan daerah kemudian Penertiban Hewan disosialisasikan kepada masyarakat peternak/pengembala dan juga instansi-instansi yang terkait dalam menjalankan Kebijakan Penertiban Hewan Tersebut.

Komunikasi yang dibangun oleh dinas-dinas terkait dengan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong sudah baik dan memadai sehingga masyarakat peternak/pengembala di kecamatan Parigi mau bekerja sama untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari Peraturan daerah No 25 tahun 2005 tentang Penertiban Hewan. Mencermati hal tersebut peneliti semaki yakin akan pentingnya sebuah komunikasi yang harus dibangun antar Dinas-Dinas terkait bersama masyarakat peternak/pengembala demi terwujudnya tertibnya pengelolaan hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong.

Karakteristik Badan Pelaksana

Bahwa Karakteristik agen pelaksana Indikator operasionalnya dapat dilihat dari Komitmen dan tanggungjawab. Pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong yang menggunakan dari aspek karakteristik agen pelaksana belum baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena

masih kurangnya tanggungjawab para implementor dan karena masih mengedepankan rasa kekeluargaan dalam upaya penertiban hewan ternak. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sangat ditentukan oleh komitmen para pelaksananya di lapangan, yang memiliki integritas dalam penegakan aturan penertiban hewan.

Lingkungan Sosial Ekonomi Politik

Salah satu aspek yang ikut mendukung Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak ini adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang merupakan lingkungan eksternal yang secara langsung mendukung kelancaran proses pelaksanaan dari Kebijakan Penertiban Hewan Ternak.

Dukungan lingkungan Sosial dan Politik dari Kabupaten Parigi Moutong sudah sangat mendukung. Sedangkan untuk dampak ekonominya akan sangat tersa bagi peternak/pengembala yang terbiasa melepas dan mengembalakan ternaknya secara sembarangan karena harus menyediakan pakan sendiri bagi ternak-ternaknya, sementara dukungan akan peraturan daerah dari pejabat sekitar dan pihak external mereka tidak terlalu memahami. Akan tetapi lingkungan external yang kondusif terutama pada ranah pemerintah dan masyarakat setempat pada akhirnya akan mempermudah berjalannya proses penerapan dari Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Parigi Moutong.

Sikap Pelaksana

Bahwa Kecenderungan (disposition) pelaksana indikator operasionalnya dapat dilihat dari Respon dan Pemahaman Pelaksana.

Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong bahwa para pelaksana memang tugas pokoknya sudah diatur. Namun para peternak mensinyalir masih kurangnya koordinasi antar pelaksana, membuat penertiban hewan di Kabupaten

Parigi Moutong belum optimal, adapun faktor yang mempengaruhinya karena pemahaman pelaksana yang masih bervariasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian tentang Impelementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong dikaji berdasarkan teori Van Meter Van Horn, yang meliputi enam indikator untuk menilai implementasi kebijakan yaitu:

Standard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, dan sikap pelaksana. Impelementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan belum cukup baik, dilihat dari keseluruhan proses implementasi kebijakan hewan ternak diberikan berdasarkan keenam indikator penilaian proses implementasi yang menjadi permasalahan terdapat pada indikator Standard dan Sasaran Kebijakan ialah menertibkan ternak yang berkeliaran di tempat umum nah faktanya dilapangan masih didapatkan hewan ternak yang berkeliaran yang mengganggu keindahan kota dan kelancaran berlalu lintas dan sasaran yang telah diamanati belum sepenuhnya tercapai dan juga sanksi-sanksinya harus lebih dipertegas guna memberi efek jera bagi pemilik atau pengembala ternak.

Selanjutnya indikator Karakteristik Badan Pelaksana atau komitmen dan tanggung jawab para impelementor membuktikan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong belum baik, dikarenakan dari segi aspek tanggungjawab Implementor belum optimal, karena secara nyata dilapangan masih adanya hewan yang berkeliaran di jalan-jalan protokol di Kabupaten Parigi Moutong dan masih mengedepankan rasa kekeluargaan dalam upaya penertiban hewan ternak.

Selanjutnya indikator Sikap Pelaksana atau respond dan pemahaman pelaksana Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong belum optimal, bisa jadi karena saling melempar tanggungjawab sebagai akibat dari tumpang tindihnya fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong dari aspek pemahaman pelaksana belum optimal.

Sementara indikator Sumber Daya, Komunikasi, Lingkungan sosial ekonomi dan Politik Sudah cukup baik. Namun tentunya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan lagi, agar mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan menciptakan keamanan dan keindahan kota sesuai yang dicita-citakan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Maupun pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Perlunya instansi yang terkait dengan penertiban hewan di Kabupaten Parigi Moutong untuk bersama-sama menyusun Revisi kembali pelaksanaan Perda No. 25 Tahun 2005. Untuk diserahkan ke Bupati dan di laksanakan oleh Dewan Perwakilan rakyat.

Perlunya koordinasi yang lebih rutin untuk supervisi terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong khususnya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Moutong kiranya dapat membentuk petugas khusus, dalam hal ini untuk menangani penertiban ternak sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat serius untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah mendapatkan arahan, saran dan bimbingan dari dosen pembimbing, untuk itu penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Dirja N Jahya, M,Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan Ibu Dr. Hj Andi Mascunra A, M.Si selaku Anggota Tim Pembimbing. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Zainal. S. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. 2003. *Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Rian. 2004. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penertiban Hewan Ternak.
- Zulkarnain. 2016. Implementasi Pemerintah Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan.
- Prpto Ciptono. 2009. Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak guna mewujudkan kesadaran warga di Kabupaten Jepara.
- Muhajirin. J. 2014. Implementasi green and cleand pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota palu.